



**PENGARUH PENERAPAN SAP, PEMANFAATAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
PERAN FUNGSI INTERNAL AUDIT TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ANITA RIYANTI
NPM 1515100014**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PENGARUH PENERAPAN SAP, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN DAN FUNGSI INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MEDAN

NAMA

: ANITA RIYANTI

N.P.M

: 1515100014

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Akuntansi

TANGGAL KELULUSAN

: 15 Oktober 2022



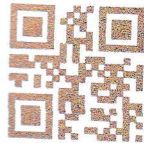
Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Renny Maisyarah, S.E., M.Si, Ak., CA.

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANITA RIYANTI
NPM : 1515100014
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SAP, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PERAN FUNGSI INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2022



(Anita Riyanti)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Riyanti
NPM : 1515100014
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



(Anita Riyanti)

ABSTRAK

Analisis penelitian untuk membuktikan apakah penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah metode kuantitatif asosiatif. Pengambilan data primer menggunakan studi kuesioner. Sampel sebanyak 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Penerapan peran dan fungsi internal audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. Penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan

Kata Kunci: Penerapan SAP, Penerapan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Fungsi Internal Audit Dan Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRAC

The research analysis is to prove whether the application of SAP, the application of the use of regional financial accounting information systems and the role and function of internal audit have a positive and significant impact on the quality of the financial statements of the Medan City Government. The data analysis technique used is associative quantitative method. Primary data collection using a questionnaire study. The sample is 30 respondents. The results showed that the partial application of SAP had a positive and significant effect on the quality of the Medan City Government's financial reports. The application of the use of regional financial accounting information systems partially has a positive and significant effect on the quality of the financial statements of the Medan City Government. The application of the role and function of the internal audit partially has a positive and significant effect on the quality of the financial statements of the Medan City Government. The application of SAP, the application of the use of regional financial accounting information systems and the role and function of internal audit simultaneously have a positive and significant effect on the quality of the financial statements of the Medan City Government..

Keywords :Application of Sap, Application of Utilization of Regional Financial Accounting Information Systems, Roles Functions of Internal Audit and Quality of Financial Reports

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Fungsi Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan”**. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CiQaR., CIQnR., CIMMR., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Renny Maisyarah, S.E., M.Si, AK.CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk member arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril mau pun materil kepada penulis.

7. Kepada kedua kakak penulis yang terbaik, Kak Lia dan kak Dewi atas dukungan dan semangat yang tidak ada putusnya kepada saya.

8. Kepada teman-temanku kontrakan gang kasih ibu no 16 B Rania, Prida, Aini, Kristina, Wilda terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang di sebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Agustus 2022
Penulis

Anita Riyanti

1515100014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian	8
F. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. LandasanTeori	10
1. Kualitas Laporan Keuangan	10
2. Penerapan SAP	13
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD).....	14
4. Peran dan Fungsi Internal Audit.....	15
B. Penelitian Sebelumnya	17
C. Kerangka Konseptual	19
D. Hipotesis.....	21
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	24
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	25
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data.....	27

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	32
	1. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kecamatan Kota Medan	32
	2. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Kota Medan	38
	3. Uraian Struktur Organisasi Kecamatan	43
	4. Pembahasan Kegiatan Organisasi.....	43
	5. Penyajian Data.....	56
	6. Uji Kualitas Data	70
	7. Pengujian Asumsi Klasik	74
	8. Pengujian Hipotesis	78
	B. Pembahasan.....	82
	1. Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	82
	2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	82
	3. Pengaruh Peran Dan Fungsi Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	83
	4. Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Peran, Fungsi Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel1.1	Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.....	1
Tabel2.1	Daftar Penelitian Sebelumnya.....	16
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian	23
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel	24
Tabel 3.3	Daftar Sampel di Pemerintahan Kecamatan Kota Medan	26
Tabel 4.1	Pernyataan X _{1.1}	57
Tabel 4.2	Pernyataan X _{1.2}	58
Tabel 4.3	Pernyataan X _{1.3}	58
Tabel 4.4	Pernyataan X _{1.4}	59
Tabel 4.5	Pernyataan X _{1.5}	59
Tabel 4.6	Pernyataan X _{2.1}	60
Tabel 4.7	Pernyataan X _{2.2}	61
Tabel 4.8	Pernyataan X _{2.3}	61
Tabel 4.9	Pernyataan X _{2.4}	62
Tabel 4.10	Pernyataan X _{2.5}	62
Tabel 4.11	Pernyataan X _{2.6}	63
Tabel 4.12	Pernyataan X _{2.7}	64
Tabel 4.13	Pernyataan X _{3.1}	64
Tabel 4.14	Pernyataan X _{3.2}	65
Tabel 4.15	Pernyataan X _{3.3}	65
Tabel 4.16	Pernyataan X _{3.4}	66
Tabel 4.17	Pernyataan X _{3.5}	67
Tabel 4.18	Pernyataan Y.1	67
Tabel 4.19	Pernyataan Y.2	68
Tabel 4.20	Pernyataan Y.3	68
Tabel 4.21	Pernyataan Y.4	69
Tabel 4.22	Pernyataan Y.5	70
Tabel 4.23	Uji Validitas X ₁ (Penerapan SAP)	70
Tabel 4.24	Uji Validitas X ₂ (Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah).....	71
Tabel 4.25	Uji Validitas X ₃ (Peran Dan Fungsi Internal Audit)	71
Tabel 4.26	Uji Validitas Y (Kualitas Laporan Keuangan).....	72
Tabel 4.27	Uji Reliabilitas X ₁ (Penerapan SAP)	72
Tabel 4.28	Uji Reliabilitas X ₂ (Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah).....	73
Tabel 4.29	Uji Reliabilitas X ₃ (Peran Dan Fungsi Internal Audit)	73
Tabel 4.30	Uji Reliabilitas Y (Kualitas Laporan Keuangan).....	74
Tabel 4.31	Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4.32	Regresi Linier Berganda	78
Tabel 4.33	Uji Simultan	79
Tabel 4.34	Uji Parsial.....	80
Tabel 4.35	Uji Determinasi.....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar2.1 Kerangka Konseptual	21
Gambar4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kota Medan.....	43
Gambar4.2 Histogram Uji Normalitas	74
Gambar4.3 PP Plot Uji Normalitas	75
Gambar4.4 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern mengakibatkan proses akuntansi dan tata keuangan mengalami perkembangan. Proses sosial dari budaya yang tidak bisa dipisahkan dari suatu bangsa merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan akuntansi di suatu negara (Mardiasmo, 2006). Indonesia merupakan negara berkembang yang melakukan pengelolaan keuangan Negara dengan didasarkan Undang-Undang yang berlaku. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan disusun dan disajikan dengan SAP yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Undang-undang tersebut diimplementasikan bersama dengan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP. Tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan Pemerintah Pusat serta daerah.

BPK menyebutkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tahun	Opini Audit
2016	WTP DPP
2017	WDP
2018	WDP
2019	WDP
2020	WDP

Sumber : IHPS I BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa selama empat tahun terakhir Pemerintah Kota Medan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil laporan pemeriksaan dari BPK pada IHPS I tahun 2020 terdapat akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak didukung dengan bukti yang cukup diantaranya terdapat pada aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, belanja modal dan beban operasi. Pada IHPS II tahun 2020 terdapat 25 jumlah permasalahan rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan total potensi kerugian senilai Rp.16.795.289.494. Selanjutnya pada IHPS II tahun 2020 terjadi permasalahan yang sama, bahwa masih terdapat akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak didukung dengan bukti yang cukup pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan penyajian belanja modal. Hal ini menjadi penyebab perolehan opini WDP pada laporan keuangan Pemerintah Kota Medan. Opini WDP menggambarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat ketidaksesuaian penyusunan yang berdasarkan SAP. Ketidaksesuaian kualitas laporan keuangan dapat terjadi karena tata kelola keuangan yang tidak tepat. Tata kelola keuangan Pemerintah Kota Medan yang tidak dilaksanakan secara transparan tanpa melampirkan kecukupan bukti untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar terutama dalam pengelolaan aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, belanja modal dan beban operasi.

Tata Kelola keuangan pemerintah mewajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip tertentu dari manajemen yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian, sehingga sumber daya pemerintah Negaradikelola dengan baik untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan

negara. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di negara tidak terlepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan wilayah (Cadbury, 2019). Salah satu fungsi terpenting dari tata kelola perusahaan adalah memastikan kualitas informasi laporan keuangan (Cohen, 2018).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan SAP sebagai salah satu faktor baiknya kualitas informasi laporan keuangan juga harus diperhatikan. SAP merupakan pedoman dasar dalam melakukan penyajian laporan keuangan pemda. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penerapan SAP diperlukan adanya pemahaman atas keseluruhan standar akuntansi yang mencakup bagaimana pengakuan pendapatan dan pengeluaran, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual dan pengakuan pendapatan dan pengeluaran dalam pelaporan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan APBN/APBD (Yahya, 2018). Penelitian ini didukung oleh (Evicahyani, 2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Tabanan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. PP No. 65 tahun 2010 yang merupakan perubahan atas PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,

mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan dapat mengefisiensi penyusunan pelaporan dan dapat mengoptimalkan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Penelitian (Evicahyani, 2016) menyebutkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah peran dan fungsi internal audit. Internal audit merupakan auditor yang bekerja didalam suatu entitas/perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas/organisasi sudah baik atau tidak, menentukan tindak efektivitas dan efisiensi prosedur aktivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas/ organisasi (Mahmudi, 2018). Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2017 menyebutkan bahwadalam melakukan pemeriksaan laporan, pemeriksa dapat menggunakan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta mengurangi kemungkinan duplikasi pekerjaan. Hal ini dimungkinkan karena pada prinsipnya, baik pemeriksa ataupun aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh peran dan

fungsi internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Suherman, 2018).

Berdasarkan uraian fenomena diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Fungsi Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Hasil laporan pemeriksaan dari BPK pada IHPS I tahun 2020 terdapat akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak didukung dengan bukti yang cukup diantaranya terdapat pada aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, belanja modal dan beban operasi.
2. Pada IHPS II tahun 2020 terdapat 25 jumlah permasalahan rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi dengan total potensi kerugian senilai Rp.16.795.289.494.
3. Pada IHPS II tahun 2020 terjadi permasalahan yang sama, bahwa masih terdapat akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak didukung dengan bukti yang cukup pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan penyajian belanja modal. Hal ini menjadi penyebab perolehan opini WDP pada laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

4. Opini WDP menggambarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat ketidaksesuaian penyusunan yang berdasarkan SAP. Ketidaksesuaian kualitas laporan keuangan dapat terjadi karena tata kelola keuangan yang tidak tepat. Tata kelola keuangan Pemerintah Kota Medan yang tidak dilaksanakan secara transparan tanpa melampirkan kecukupan bukti untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar terutama dalam pengelolaan aset lancar, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, belanja modal dan beban operasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi karena keterbatasan dana, waktu dan pengetahuan penulis, agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh penerapan SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah:

1. Apakah penerapan SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan?

2. Apakah penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan?
3. Apakah penerapan peran dan fungsi internal audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan?
4. Apakah penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara empiris apakah penerapan SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui secara empiris apakah penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui secara empiris apakah penerapan peran dan fungsi internal audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

- d. Untuk mengetahui secara empiris apakah penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengaruh penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

- b. Bagi Pemerintahan Daerah Kota Medan

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kota Medan untuk memperhatikan pengaruh penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

- c. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sari (2018), dengan judul: Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada yaitu:

- 1. Variabel Penelitian :** penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan.
- 2. Jumlah Data (n) :** penelitian terdahulu menggunakan sampel sebanyak 88 responden. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden.
- 3. Waktu Penelitian :** penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini tahun 2022.
- 4. Lokasi Penelitian :** lokasi penelitian terdahulu di Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana, sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal (Mahsun, 2019). Berdasarkan PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode..

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna untuk membuat keputusan (Mahmudi, 2018) .Secara spesifik, penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya.

Tujuan laporan keuangan dapat dipenuhi dengan karakteristik kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP No 71 tahun 2010. Karakteristik kualitas laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebaai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi peristiwa

masa kini atau masa lampau dan dapat memprediksi kejadian masa depan serta dapat mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan dapan dihubungkan dengan maksud pengguna informasi. Informasi dapat dikatakan relevan apabila :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat koreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Untuk memprediksi masa yang akan datang dibutuhkan informasi yang dapat membantu dengan melihat hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi yang disajikan harus tepat waktu sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Laporan penyajian informasi akuntansi keuangan harus lengkap dengan melatar belakang setiap butir informasi utama yang diungkapkan agar jelas dan tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

2. Andal

Laporan keuangan disajikan dengan informasi yang bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, disajikan secara jujur berdasarkan fakta, serta dapat di verifikasi. Informasi yang disajikan mungkin relevan, namun jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal adalah sebagai berikut :

a. Penyajian jujur

Informasi yang disajikan dengan jujur serta secara wajar dapat diharapkan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dapat diuji, dan apabila dilakukan pengujian kembali oleh pihak yang berbeda maka hasil simpulan yang didapat tidak jauh berbeda.

c. Netralitas

Informasi disajikan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya sehingga dapat lebih berguna. Perbandingan dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan mudah dipahami agar dapat bermanfaat bagi penggunanya. Pengguna diasumsikan memiliki kualitas yang memadai serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud dalam laporan.

2. Penerapan SAP

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan. Di Indonesia pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menerapkan SAP berbasis Akrual yang dinyatakan dalam bentuk PSAP yang tercantum pada lampiran I PP No. 71 tahun 2010. Lampiran I yang dimaksud adalah SAP Berbasis Akrual yang terdiri atas Kerangka Konseptual dan PSAP Nomor 01 sampai dengan PSAP Nomor 12.

Implementasi dari peraturan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh laporan keuangan daerah telah menerapkan SAP berbasis akrual. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Roni, 2018).

3. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem informasi akuntansi keuangan saat ini sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai organisasi sektor publik agar pemerintahan berjalan lebih efektif, efisien, bersih dan transparan. Penggunaan Sistem informasi keuangan juga dapat membantu dalam melakukan pengendalian keputusan. Pemanfaatan SIKD dalam pengelolaan keuangan daerah memanfaatkan program teknologi informasi yang mendukung sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah sarana bagi Pemerintah untuk mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan daerah sebagai sarana menunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Pemanfaatan SIKD adalah penerapan sistem informasi dari masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sari, 2018).

Berdasarkan PP No 65 tahun 2010, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah dengan tujuan antara lain:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Evicahyani, 2016) pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tabanan. Selanjutnya, (Surastiani, 2018) dan (Yuliani., 2020), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Peran dan Fungsi Internal Audit

The international standarts for the Profesional practice of internal auditing (SPPIA) menyatakan bahwa Internal Audit merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan menambah nilai dan memberi peningkatan operasi dalam sebuah organisasi. Kegiatan yang dilakukan akan membantu organisasi atau institusi yang bersangkutan untuk mencapai tujuan dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola melalui pendekatan yang sistematis dan teratur (Sawyer, 2017).

Bedasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, bahwa pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara tidak semata-mata dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, BPK sebagai badan pemeriksa keuangan

memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah untuk membantu dalam mempermudah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai (Sawyer, 2017).

Audit internal merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda untuk menentukan bahwa informasi yang didapat akurat dan dapat diandalkan, dapat mengidentifikasi dan meminimalkan risiko perusahaan, mengikuti peraturan dan kebijakan prosedur eksternal, telah memenuhi kriteria operasi yang memuaskan, penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan ekonomis untuk melakukan konsultasi kepada manajemen dan membantu anggota dalam melakukan tanggungjawabnya secara efektif (Sawyer, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu (Yuliani, 2020) peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota Banda Aceh. Selanjutnya penelitian Suherman (2018) menyatakan bahwa peran internal audit memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

B. Penelitian Sebelumnya

Berikut ini akan diuraikan beberapa daftar penelitian-penelitian terdahulu adalah:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama Tahun /	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Sari (2018)	Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pmerintah Kabupaten Jembrana).	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) (X_1) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) Kualitas laporan keuangan (Y)	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Evicahyani (2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan.	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) (X_1) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) Kualitas laporan keuangan (Y)	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Adha (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1)	Analisis Jalur	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peran Audit Internal

		Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating.	Kompetensi Aparatur (X ₂) Peran Audit Internal (X ₃) Sistem Pengendalian Intern (Z) Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)		berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
4	Harlinda (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau).	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) (X ₁) Peran dan fungsi internal audit (X ₂) Kualitas laporan keuangan (Y)	Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan Peran dan fungsi internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Manullang (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating.	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) (X ₁) Peran dan fungsi internal audit (X ₂) Komitmen Organisasi (Z) Kualitas laporan keuangan (Y)	Analisis Jalur	Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan Peran dan fungsi internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber : Diolah Penulis 2022

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

PP nomor 71 Tahun 2010, pengertian SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kualitas tata kelolaan keuangan negara akan semakin baik jika penerapan SAP telah dilakukan dengan baik pula. Hal ini sejalan dengan penelitian (Roni, 2018) yang menyebutkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Evicahyani, 2016) juga menyebutkan bahwa pengaruh penerapan SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan PP nomor 65 tahun 2010, SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Proses pengelolaan data dan transaksi serta penyajian laporan keuangan akan sangat terbantu jika pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini juga akan berdampak pada ketepatan waktu pemerintah daerah dalam melakukan penyajian informasi laporan keuangan

daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Evicahyani., 2016) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kalitas laporan keuangan daerah. Penelitian (Yuliani, 2020) menyatakan bahwa SIAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut PP nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

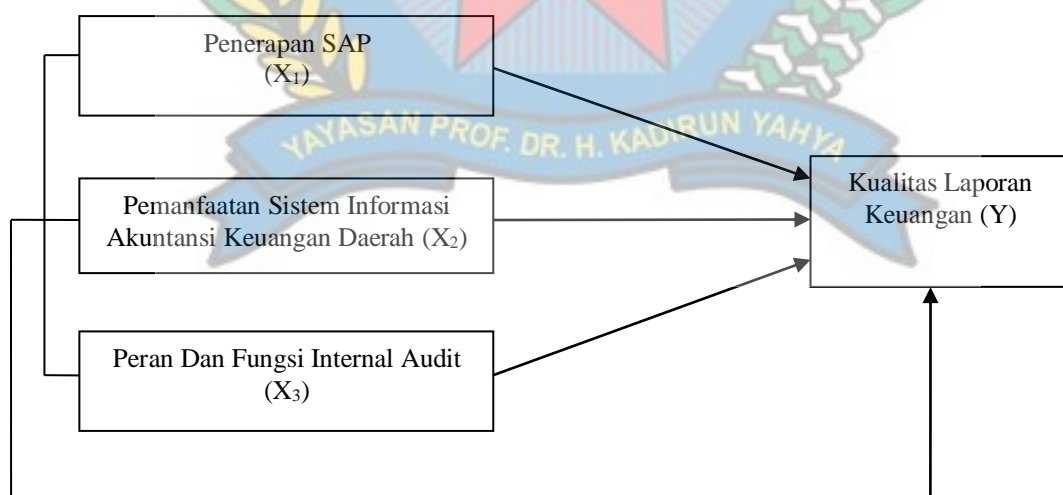
Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. Jadi, sistem pengendalian intern adalah faktor eksternal yang dirancang untuk memudahkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian (Evicahyani, 2016) bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung penengndalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten tabanan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Indriasih, 2018) (Afiah, 2017) bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualtas laporan keuangan daerah.

PP nomor 71 Tahun 2010, penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Proses pengelolaan data dan transaksi serta penyajian laporan keuangan akan sangat terbantu jika pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat dilakukan

dengan baik. Hal ini juga akan berdampak pada ketepatan waktu pemerintah daerah dalam melakukan penyajian informasi laporan keuangan daerah. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. Jadi, sistem pengendalian intern adalah faktor eksternal yang dirancang untuk memudahkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Penulis 2022

D. Hipotesis

Menurut Situmorang (2018), “Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementaramengenai perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi”. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yangkemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Fungsi darihipotesis ini adalah untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah

1. Diduga penerapan SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
2. Diduga penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
3. Diduga penerapan peran dan fungsi internal audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
4. Diduga penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran fungsi internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:14), penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kota Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2022 sampai dengan September 2022, dengan format berikut:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Tahun															
		April 2022			Mei 2022			Juni 2022			Juli 2022			Agustus 2022			September 2022
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal				■												
3	Seminar Proposal							■									
4	Perbaikan Acc Proposal										■						
5	Pengolahan Data										■						
6	Penyusunan Skripsi													■			
7	Bimbingan Skripsi													■			
8	Meja Hijau													■			

Sumber: Penulis (2022)

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama penerapan SAP (X_1), variabel bebas kedua penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2) dan variabel bebas ketiga peran dan fungsi internal audit (X_3) serta 1 (satu) variabel terikat kualitas laporan keuangan (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran / Indikator	Skala
1	Penerapan SAP (X_1)	Pererapan prinsip-prinsip akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam Permendagri No. 64 tahun 2013 dengan melaksanakan ketentuan PP nomor 71 tahun 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. PSAP 01 Penyajian Laporan 2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 3. PSAP 03 Laporan Arus Kas Keuangan 4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan <p>Sumber : Roni (2018)</p>	Likert
2	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X_2)	Penerapan sistem yang dimulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan informasi yang digunakan oleh pengguna dalam mengambil keputusan oleh masing-masing SKPD dalam penyusunan laporan keuangan pemda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kecepatan 2. Tingkat keamanan 3. Efisiensi biaya 4. Tingkat kualitas hasil <p>Sumber : Sari (2018)</p>	Likert

3	Peran dan fungsi internal audit (X_3)	Penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda untuk menentukan bahwa informasi yang didapat akurat dan dapat diandalkan, dapat mengidentifikasi dan meminimalkan risiko perusahaan, mengikuti peraturan dan kebijakan prosedur eksternal, telah memenuhi kriteria operasi yang memuaskan, penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan ekonomis untuk melakukan konsultasi kepada manajemen dan membantu anggota dalam melakukan tanggungjawabnya secara efektif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan secara berkala, 2. Pemeriksaan terpadu, 3. Pemeriksaan tindak lanjut, 4. Evaluasi atas program dan kegiatan <p>Sumber: Sawyer (2017)</p>	Likert
4	Kualitas laporan keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP nomor 71 tahun 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami <p>Sumber : Mahsun (2019)</p>	Likert

Sumber: Penulis (2022)

D. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018 : 72), “populasi penelitian merupakan seluruh elemen/unsur yang akan diamati atau diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Kota Medan, sehingga total populasi yang menjadi sampel adalah sebanyak 21 Kecamatan.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018 : 72), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* yaitu non-probabilitas sampling teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman, kedekatan mereka kepada peneliti dan secara kebetulan. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi dan peneliti tidak mempertimbangkan memilih responden yang mewakili seluruh populasi. Rincian kecamatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Daftar Sampel di Pemerintahan Kecamatan Kota Medan

No	Kecamatan	Rincian Atau Uraian Kriteria	Sampel Responden
1	Medan Kota	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
2	Medan Labuhan	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
3	Medan Perjuangan	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
4	Medan Marelan	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
5	Medan Barat	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
6	Medan Timur	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
7	Medan Sunggal	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
8	Medan Helvetia	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
9	Medan Petisah	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
10	Medan Deli	Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat	3
Jumlah			30

Sumber : medankota.bps.go.id

Kriteria penelitian yang dilakkan di 10 Pemerintahan Kecamatan di Kota Medan yaitu Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran angket ke Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat Pemerintahan Kecamatan di Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikemukakan, maka metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah metode penyebaran angket ke Bagian Keuangan, Bendahara dan Camat Pemerintahan Kecamatan di Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:88), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut. Persyaratan uji validitas setiap pertanyaan $> 0,30$ maka butir pertanyaan dianggap valid.

b. Uji Reliabilitas (kehandalan)

Menurut Ghozali (2018:89), “uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel-variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini berarti reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan beberapa kali. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menghitung cronbach alpha masing-masing item dengan bantuan SPSS *for windows*. Suatu instrument dikatakan reliabel jika

mempunyai nilai alpha positif dan lebih besar dari 0,6. Dimana semakin besar nilai alpha, maka alat pengukur yang digunakan semakin handal (reliabel).

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu, uji normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:90).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018:91). Syarat dalam analisis parametrik yaitu data harus normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018 : 91). Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) = $1/\text{Tolerance}$, jika VIF = 10 maka $1/10 = 0.1$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2018). Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- 1) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, jika terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (independen). Dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas (independen) . membuat persamaan regresi diharapkan mampu menerangkan lebih baik karakteristik dari variabel tak bebas (dependen) dan nilai koefisien determinasi diharapkan semakin besar dan nilai standar eror semakin kecil sehingga persamaan regresi yang dihasilkan lebih baik. Model regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Model persamaanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kualitas Audit (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Penerapan SAP (*Independent Variabel*)

X_2 = Penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
(*Independent Variabel*)

X_3 = Peran dan fungsi internal audit (*Independent Variabel*)

ϵ = error

1. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2019:103). Hipotesis nol, atau H_0 : $b_i = 0$, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau H_a : $b_i \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika nilai signifikan $> \alpha$ (0,05), H_0 diterima
- 2) Jika nilai signifikan $< \alpha$ (0,05), H_0 ditolak.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Priyatno, 2019). Hipotesis nol (H_0) yang hendaknya diuji apakah semua parameter dalam model sama

dengan nol, atau : $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

- 1) Jika nilai signifikan $> \alpha (0,05)$, H_0 diterima
- 2) Jika nilai signifikan $< \alpha (0,05)$, H_0 ditolak
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah *Square* variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *R Square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kecamatan Kota Medan

A. Sejarah Kecamatan Medan Kota

Kecamatan Medan Kota adalah salah satu dari 21 Kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Kota berbatasan dengan Medan Maimun di sebelah barat, Medan Denai di sebelah Timur, Medan Amplas di sebelah Selatan dan Medan Area di sebelah Utara. Pada Tahun 2001 kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 84.530 jiwa. Luasnya adalah 5,27 Km² dan kepadatan penduduknya adalah 16.039,85 jiwa / Km². Kecamatan Medan Kota terletak di Jl. Stadion No.3 Medan, Tlp (061) 7366765. Camat Syahrul Effendi Rambe, S.Sos.

B. Sejarah Kecamatan Medan Labuhan

Awalnya pada tahun 1869, Belanda membuka area perkebunan Tembakau khas Sumatera Timur yang merupakan tembakau yang terkenal di Eropa. Sejarah Martubung ada hubungannya dengan sejarah kota medan, seperti pada tahun 1866, Janssen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan Deli Maatschappij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri".

Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan". Di masa sekarang, Martubung sudah menjelma menjadi kawasan perumahan, daerah pergudangan, area pertanian dan juga lokasi strategis untuk berbisnis yang terintegrasi dengan Tol Belmera.

C. Sejarah Kecamatan Medan Perjuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 dan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 Kecamatan Medan Perjuangan terbentuk dari pemekaran Kecamatan Medan Timur dan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah / delegasi wewenang dari Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Perjuangan melaksanakan tugas pokok, melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan ,Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan Masyarakat. Kecamatan Medan Perjuangan dipimpin Camat H.Pahri ,S.Sos. MAP.

D. Sejarah Kecamatan Medan Marelan

Dahulunya Kecamatan Medan Marelan adalah daerah perkebunan tembakau yang pada mulanya berpenduduk asli melayu, kemudian setelah dibukanya Perkebunan Tembakau Deli, sampai sekarang penduduk Medan Marelan mayoritas adalah suku Jawa. Kecamatan Medan Marelan terletak di bagian utara Kota Medan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor :

138/402/K/SK/1991 tanggal 21 Maret 1991, Kecamatan Medan Marelan dijadikan salah satu kecamatan perwakilan di Kota Medan yaitu pemekaran dari Kecamatan Medan Labuhan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 35 tahun 1992 tanggal 2 September 1992 didefenitifkan menjadi Kecamatan Medan Marelan. Pada awalnya Kecamatan Medan Marelan terdiri dari 4 kelurahan, berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 146.1/1101/K/1994 tanggal 13 Juni 1994 tentang pembentukan 7 Kelurahan Persiapan di Kota Medan, salah satunya adalah Kelurahan Paya Pasir dan setelah didefenitif, jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan menjadi 5 (lima).

E. Sejarah Kecamatan Medan Barat

Kecamatan Medan Barat adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di bagian tengah wilayah Kota Medan memiliki luas \pm 540.9 Ha dan berada pada ketinggian 26 – 50 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Medan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tanggal 10 Mei 1973. Kecamatan Medan Barat ini merupakan Kecamatan inti di Kota Medan. Dikatakan kecamatan inti karena pada awal terbentuknya Kota Medan, Kecamatan di Kota Medan hanya ada 4 (empat) Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Medan Barat. Adapun kantornya telah menempati bangunan permanen dengan luas tanah \pm 1500 m² dan luas bangunan 812 m² dan dahulu bernama Kantor asisten wedana yang diresmikan pada tanggal 1 April 1971, yang beralamat di Jl. Budi Pembangunan No. 1 Medan.

F. Sejarah Kecamatan Medan Timur

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu Kecamatan Induk Kota Medan, yang berbentuk pada saat dibentuknya Kota Medan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 1992 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tk.II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tk.I Sumatera Utara, Kecamatan Medan Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kecamatan Medan Timur dengan 11 (sebelas) kelurahan dan Kecamatan Medan Perjuangan dengan 9 (sembilan) kelurahan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Medan Timur terletak di Jalan HM.Said No.1 Kelurahan Garu berada di areal tanah seluas 1400 M² yang memiliki fasilitas 1 (satu) unit gedung kantor, 1 (satu) unit rumah dinas 1 (satu) unit aula dengan luas 1000M². Dengan Camat Medan Timur Drs. Parulian Pasaribu M.Si.

G. Sejarah Kecamatan Medan Sunggal

Kecamatan Medan Sunggal berasal dari nama Kerajaan Sunggal Serba Nyaman yang sebelumnya bernama Sunggal yaitu sebuah kampung yang didirikan oleh Datuk Adir Surbakti di daerah Sembuaikan di Kaki Gunung Sibayak, kemudian oleh keturunan beliau yang bernama Datuk Abdullah Ahmad Surbakti Pada tahun 1945 memindahkan Pusat Pemerintahan ke Sunggal yang sekarang ada disekitar Kec. Medan Sunggal. Kemudian pada tahun 1866-1895 Datuk Baiduzzaman memerintah Kerajaan Sunggal dengan gelar Datuk Sri Diraja

Indra Pahlawan dan karena melawan penjajahan Belanda beliau diasingkan ke Cianjur Jawa Barat hingga akhir hayatnya.

H. Sejarah Kecamatan Medan Helvetia

Kecamatan Medan Helvetia adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Wilayah Kota Medan memiliki luas $\pm 1.156.147$ Ha dan merupakan pecahan dari Kecamatan Medan Sunggal. Sebelum menjadi kecamatan defenitif terlebih dahulu melalui proses Kecamatan Perwakilan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/1991 tanggal 05 Pebruari 1991 dan Keputusan Walikota Medan Nomor : 138/595/SK/1991 tanggal 20 Meret 1991 dirubah namanya menjadi Perwakilan Kecamatan Medan Helvetia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1991 didevinitifkan menjadi kecamatan Medan Helvetia yang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 1991 yang terdiri atas 7 (tujuh) Kelurahan yaitu : Kelurahan Helvetia, Helvetia Tengah, Helvetia Timur, Dwi Kora, Cinta Damai, Tanjung Gusta dan Sei Sikambing C-II. Adapun kantornya telah menempati bangunan permanen yang terletak di Jalan Beringin X No 2 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia dengan luas tanah ± 1.800 m² dan luas bangunan 375 m² dan dibangun atas bantuan partisipasi pihak ketiga/masyarakat yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 04 Juni 1992. Sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Medan Helvetia dari tahun 1991 sampai sekarang, wilayah ini telah dipimpin oleh beberapa Camat.

I. Sejarah Kecamatan Medan Petisah

Kecamatan Medan Petisah menurut Sejarah berawal dari pabrik es yang terletak di JL.S. Parman dengan nama “Sari Pateje Es” pada tahun 1960 an. Yang

memproduksi es batangan (es balok) yang dikemas dalam peti. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pada waktu itu menyebutnya dengan “Peti Basah” sehingga berubah menjadi “Petisah”. Dasar pembentukan Kecamatan Medan Petisah setelah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tanggal 07 September 1991 tentang pembentukan Beberapa Kecamatan di Sumatera Utara termasuk 8 (delapan) Kecamatan pemekaran di Kotamadya medan Tingkat II Medan. Adapun Kantor Camat Medan Petisah diresmikan pada tanggal 02 September 1992 oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, dimanawilayah Kecamatan Medan Petisah yang dulunya adalah merupakan bagian dari Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Barat.

J. Sejarah Kecamatan Medan Deli

Kecamatan Medan Deli adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di bagian Utara Wilayah Kota Medan memiliki luas \pm 2.300 Ha. Kecamatan Medan Deli merupakan pemekaran dari Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1973 tanggal 10 Mei 1973 yang mana awalnya Kecamatan Medan Deli terdiri dari 5 (lima) Kelurahan. Seiring dengan perkembangan penduduk di Kecamatan Medan Deli, akhirnya Pada Tahun 1987 telah bertambah lagi 1 (satu) Kelurahan hasil pemekaran dari Kelurahan Tanjung Mulia yaitu Kelurahan Tanjung Mulia Hilir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1987 Nomor : 140/4078/K/1987 tentang Pemekaran Kelurahan di wilayah Kota Medan. Sehingga Kecamatan Medan Deli menjadi 6 (enam) Kelurahan. Kecamatan Medan Deli merupakan Daerah Industri dan pemukiman

dengan luas areal 2.300 Ha, yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan dan memiliki 105 Lingkungan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Labuhan
 Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Barat dan Kec. Medan Timur
 Sebelah Timur : Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
 Sebelah Barat : Kecamatan Labuhan Deli Kab. Deli Serdang

2. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Kota Medan

A. Visi dan Misi Kecamatan Medan Kota

a. Visi Kecamatan Medan Kota

Dengan Mengacu Kepada Visi Kota Medan, Kita Mewujudkan Kecamatan Medan Kota Yang Profesional Responsif dan AkunTabel.

b. Misi Kecamatan Medan Kota

- 1) Mewujudkan Terselenggaranya Pelayanan kepada Masyarakat secara Profesional, responsif dan AkunTabel dengan Mendayagunakan Seluruh Aparatur.
- 2) Meningkatkan Dukungan Secara Penuh pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kota yang berbasiskan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Meningkatkan Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Berbudi pekerti Luhur, Beriman dan Bertaqwa.
- 4) Mewujudkan Terpeliharanya Kondusifitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya serta Keamanan dan Ketentraman Wilayah.

B. Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan

a. Visi Kecamatan Medan Labuhan

Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Kredibilitas dan Profesional dalam Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Kecamatan Medan Labuhan.

b. Misi Kecamatan Medan Labuhan

- 1) Menciptakan pemerintahan yang profesional dalam pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kualitas kepemimpinan yang demokrasi, berkeadilan, dan transparan.
- 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

C. Visi dan Misi Kecamatan Medan Perjuangan

a. Visi Kecamatan Medan Perjuangan

Mewujudkan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan Yang Perduli, Berdaya Saing dan Sejahtera Sebagai Kawasan Pintu Gerbang Kota Medan Metropolitan yang Nyaman dan Religius.

b. Misi Kecamatan Medan Perjuangan

Meningkatkan Pelayanan Secara Transparan, Akuntabel dan Partisipatif Untuk Mendorong Terciptanya Rasa Aman yang Dinamis Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat.

D. Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelan

a. Visi Kecamatan Medan Marelan

Menciptakan Kecamatan Medan Marelan yang Bersih, Sehat, Aman, Rapi dan Indah serta berwawasan lingkungan

b. Misi Kecamatan Medan Marelan

- 1) Meningkatkan kebersihan lingkungan
- 2) Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatkan Kamtibmasa yang kondusif
- 4) Meningkatkan penghijauan

E. Visi dan Misi Kecamatan Medan Barat

a. Visi Kecamatan Medan Barat

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Medan Barat yang sejahtera dan bermartabat.

b. Misi Kecamatan Medan Barat

- 1) Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur kelurahan.
- 3) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 4) Mewujudkan hubungan yang responsif antara Pemerintah dan masyarakat.

F. Visi dan Misi Kecamatan Medan Timur

a. Visi Kecamatan Medan Timur

Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang profesional,akunTabel, dan transparan di Kecamatan Medan Timur.

b. Misi Kecamatan Medan Timur

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Peningkatan partisipatif masyarakat dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tetap mengedepankan asas pemberdayaan serta kemandirian.
- 3) Menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien.

G. Visi dan Misi Kecamatan Medan Sunggal

a. Visi Kecamatan Medan Sunggal

Melayani, Amanah, Nyaman, Tertib, Akuntabel dan Profesional.

b. Misi Kecamatan Medan Sunggal

- 1) Mewujudkan Pelayanan Yang Profesional
- 2) Akuntabel & Transparan
- 3) Mewujudkan Pelayanan Ramah & Nyaman
- 4) Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat
- 5) Tanpa Pungutan Biaya

H. Visi dan Misi Kecamatan Medan Helvetia

a. Visi Kecamatan Medan Helvetia

Dengan mengacu kepada visi Kota Medan, kita ciptakan Kecamatan Medan Helvetia sebagai miniatur Kota medan.

b. Misi Kecamatan Medan Helvetia

- 1) Memberdayakan kelurahan dengan memberdayakan masyarakat
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- 4) Meningkatkan kebersihan
- 5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- 6) Meningkatkan Kamtibmas yang kondusif
- 7) Meningkatkan penghijauan
- 8) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

I. Visi dan Misi Kecamatan Medan Petisah

a. Visi Kecamatan Medan Petisah

Medan Petisah menjadi kecamatan multikultural yang berbasis pelayanan terpadu, sinergi, professional dan akunTabel.

b. Misi Kecamatan Medan Petisah

- 1) Menyiapkan sarana dan sistem pelayanan yang terpadu.
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi hubungan internal dan eksternal.
- 3) Mewujudkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan responsif.
- 4) Mewujudkan pelayanan yang memiliki standar dan transparan.

J. Visi dan Misi Kecamatan Medan Deli

a. Visi Kecamatan Medan Deli

Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Profesional, Kredibel, Madani dan Religius.

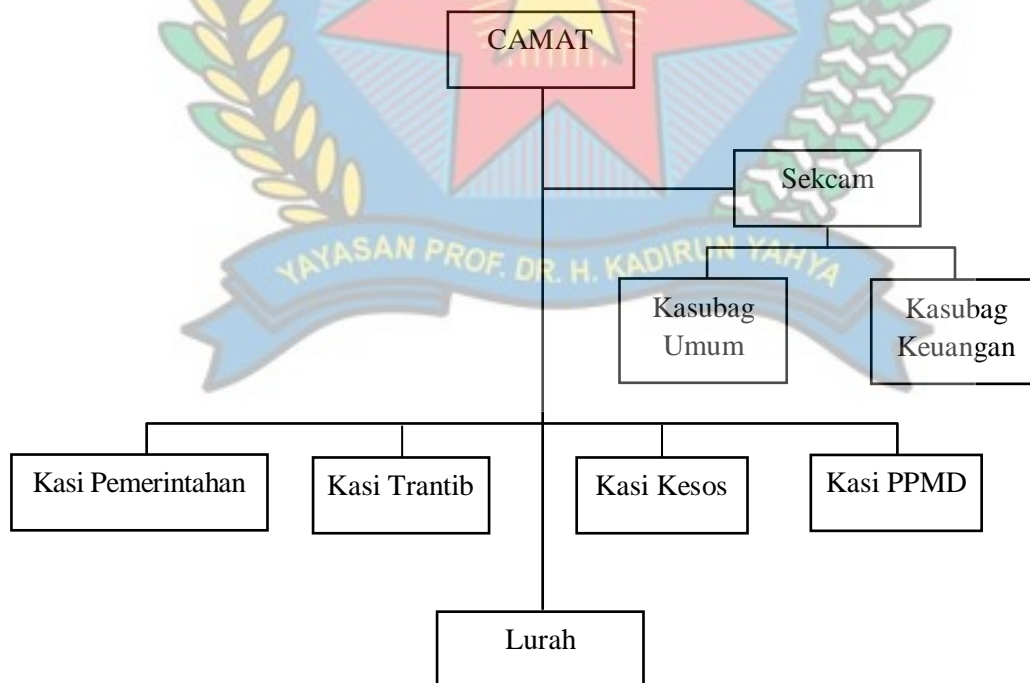
b. Misi Kecamatan Medan Deli

- 1) Meningkatkan Kualitas Pemerintah Yang Demokratis, Berkeadilan, Transparan dan AkunTabel.
- 2) Mendorong Terciptanya Pembangunan Di wilatah Kecamatan Medan Amplas.

- 3) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur di Dalam Menyelenggarakan Organisasi Kecamatan Medan Amplas.
- 4) Mendorong Peran Aktif masyarakat dalam budaya gotong royong dan Swadaya masyarakat.

3. Uraian Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur organisasi pada Kecamatan Kota Medan adalah sebagai berikut:



Sumber : Kecamatan Kota Medan, 2022

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kecamatan Kota Medan

4. Pembahasan Kegiatan Organisasi

Berikut ini adalah pembahasan kegiatan organisasi atau uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap bagian struktur organisasi Kecamatan Kota Medan adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin, merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok kecamatan baik kesekretariatan, tugas umum pemerintahan yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa maupun pelimpahan urusan otonomi.
- 2) Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah.
- 3) Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah.
- 4) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kecamatan yang berkoordinasi dengan Instansi terkait di bawah koordinasi tim anggaran pendapatan daerah.
- 5) Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada bupati dalam rangka percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Kota Medan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, instansi vertikal terkait yang ada di daerah,

provinsi dan pusat maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

- 7) Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 8) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
- 9) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya.
- 11) Bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang satuan kerja perangkat daerah.
- 12) Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas kecamatan termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- 13) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum, dan perlengkapan serta barang milik daerah pada SKPD maupun kepegawaian.

- 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan program kerja kecamatan berdasarkan program dan kegiatan masing-masing seksi.
- 3) Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi sesuai dengan petunjuk atasan kepada seluruh bidang dalam lingkungan kecamatan.
- 4) Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan masing-masing seksi.
- 5) Bertindak selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya.
- 6) Mengendalikan pendistribusian pelayanan naskah dinas dan mengkoordinasikan tugas-tugas seksi dan sub bagian sesuai dengan petunjuk atasan.
- 7) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas.
- 8) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas seksi.
- 10) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh camat.

c. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan laporan atas pelaksanaan program kerja.
- 2) Mengolah data dan bahan penyusunan laporan atas pelaksanaan program kerja.
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dalam hal prosedur, mekanisme, sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan program.
- 4) Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi.
- 5) Menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
- 6) Melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan pelayanan publik.
- 7) Melaksanakan penerimaan dan pendistribusian naskah dinas melalui pengelolaan kearsipan.
- 8) Melaksanakan rencana pengadaan alat tulis kantor dan pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan dinas.
- 9) Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan badan.
- 10) Melaksanakan penyiapan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai.
- 11) Melaksanakan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- 12) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubungan masyarakat dan pendokumentasian kegiatan badan.

- 13) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan ketertiban serta keamanan kantor.
- 14) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan aset dinas bergerak dan tidak bergerak yang menjadi tanggung jawab badan.
- 15) Menghimpun dan menyusun penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan badan untuk rencana pengadaan barang milik daerah.
- 16) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, dan inventarisasi sesuai ketentuan berlaku dan membuat laporan barang milik daerah secara periodik.
- 17) Melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan badan.
- 18) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai.
- 19) Mempersiapkan dokumen terhadap pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, serta kesejahteraan pegawai.
- 20) Mempersiapkan dokumen kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 21) Mempersiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan ujian dinas maupun tugas belajar.
- 22) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional.
- 23) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan badan.
- 24) Melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

- 25) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian.
- 26) Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 27) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
- 28) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.
- 29) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala sub bagian keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
- 2) Menyusun perencanaan pembangunan kecamatan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten.
- 3) Menyusun rencana anggaran kecamatan sesuai dengan rencana kerja kecamatan mengacu kepada rencana strategis kecamatan.
- 4) Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dasar berdasarkan KUA dan PPA.
- 5) Memverifikasi usulan Rencana Kerja Anggaran masing-masing bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan mengacu kepada KUA.
- 6) Menyusun bahan rencana pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan prosedur, dan sistem kerja.

- 7) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan rencana kerja anggaran masing-masing bidang dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran (PPA).
- 8) Menghimpun dan memverifikasi usulan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing bidang berdasarkan rencana kerja dan anggaran.
- 9) Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana satuan kerja perangkat daerah (SPD-SKPD) berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
- 10) Menghimpun dan menatausahakan surat penyediaan dana (SPD) yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
- 11) Mempersiapkan bahan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas bidang dan mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan pelaksanaan dinas.
- 12) Bertindak sebagai pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD).
- 13) Menyusun laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah berkoordinasi dengan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan satuan kerja perangkat daerah (PPTK- SKPD).
- 14) Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 15) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.

- 16) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.
- 17) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 3) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- 6) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, dan perangkat desa.

- 8) Mempersiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan.
- 9) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
- 10) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
- 11) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- 12) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
- 13) Mempersiapkan bahan penyusunan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan serta pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- 14) Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 15) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.

16) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.

17) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 7) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.

- 8) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.
- 9) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan dan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada camat melalui sekretaris.
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Sosial dan Kemasyarakatan

Kepala seksi sosial dan kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi sosial kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 5) Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- 6) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.
- 7) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.
- 8) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada camat melalui sekretaris.
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 2) Melakukan pembinaan di bidang Pembangunan dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.
- 3) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 6) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan.

- 7) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3.
- 8) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris.
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Lurah

Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 5) Membina perekonomian desa.
- 6) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

5. Penyajian Data

Penelitian ini 3 (tiga) variabel bebas yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan. Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 30 orang. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Setuju (S) dengan skor 4
- c. Ragu-Ragu (R) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan pada Tabel-Tabel berikut:

1. Penerapan SAP (X₁)

Tabel 4.1
Dinas ini menerapkan basis akrual yang mengakui aset dan kewajiban.
Pernyataan X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	56.7
	Setuju	12	40.0	40.0	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa dinas ini menerapkan basis akrual yang mengakui aset dan kewajiban.

Tabel 4.2
Dinas ini mencatat pendapatan sesuai dengan asas bruto.

Pernyataan X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	9	30.0	30.0	46.7
	Setuju	13	43.3	43.3	90.0
	Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.2, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (10.0%), setuju sebanyak 13 orang (43.3%), ragu-ragu sebanyak 9 orang (30.0%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa dinas ini mencatat pendapatan sesuai dengan asas bruto.

Tabel 4.3
Dinas ini menyusun laporan arus kas sesuai dengan SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan dan investasi.

Pernyataan X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	10	33.3	33.3	53.3
	Setuju	12	40.0	40.0	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.7%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 10 orang (33.3%) dan sebanyak 6 orang (20.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju

bahwa dinas ini menyusun laporan arus kas sesuai dengan SAP yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan dan investasi.

Tabel 4.4
Dinas ini menyajikan Catatan atas laporan keuangan setiap periode pelaporan.
Pernyataan X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	56.7
	Setuju	12	40.0	40.0	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa dinas ini menyajikan Catatan atas laporan keuangan setiap periode pelaporan.

Tabel 4.5
Dinas ini mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah.
Pernyataan X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	53.3
	Setuju	10	33.3	33.3	86.7
	Sangat Setuju	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (13.3%), setuju sebanyak 10 orang (33.3%), ragu-ragu

sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 4 orang (13.3%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa dinas ini mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah.

2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Tabel 4.6

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat, mudah dan akurat.

Pernyataan X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	26.7
	Ragu-Ragu	6	20.0	20.0	46.7
	Setuju	12	40.0	40.0	86.7
	Sangat Setuju	4	13.3	13.3	100.0
	Total		30	100.0	100.0

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (13.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 6 orang (20.0%), tidak setuju sebanyak 6 orang (20.0%) dan sebanyak 2 orang (6.7%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa laporan keuangan dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat, mudah dan akurat.

Tabel 4.7
Batasan akses penggunaan komputer hanya pegawai/staf bagian sub bagian akuntansi dan keuangan guna menjaga kerahasiaan data dan keamanan data.

Pernyataan X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	11	36.7	36.7	36.7
	Setuju	10	33.3	33.3	70.0
	Sangat Setuju	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (30.0%), setuju sebanyak 10 orang (33.3%) dan sebanyak 11 orang (36.7%) responden yang menyatakan ragu-ragu. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 11 orang (36.7%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan setuju bahwa batasan akses penggunaan komputer hanya pegawai/staf bagian sub bagian akuntansi dan keuangan guna menjaga kerahasiaan data dan keamanan data.

Tabel 4.8
Jaringan internet dan jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi telah terpasang di unit kerja.

Pernyataan X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Tidak Setuju	2	6.7	6.7	13.3
	Ragu-Ragu	11	36.7	36.7	50.0
	Setuju	13	43.3	43.3	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.8, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.7%), setuju sebanyak 13 orang (43.3%), ragu-ragu sebanyak

11 orang (36.7%), tidak setuju sebanyak 2 orang (6.7%) dan sebanyak 2 orang (6.7%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa jaringan internet dan jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi telah terpasang di unit kerja.

Tabel 4.9
Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan perundang-undangan.
Pernyataan X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	13	43.3	43.3	43.3
	Setuju	15	50.0	50.0	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.9, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.7%), setuju sebanyak 15 orang (50.0%) dan sebanyak 13 orang (43.3%) responden yang menyatakan ragu-ragu. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (50.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan perundang-undangan.

Tabel 4.10
Teknologi informasi akan menghasilkan hasil (*output*) berupa laporan keuangan dengan tepat waktu dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Pernyataan X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	5	16.7	16.7	36.7
	Setuju	6	20.0	20.0	56.7
	Sangat Setuju	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.10, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%), setuju sebanyak 6 orang (20.0%), ragu-ragu sebanyak 5 orang (16.7%), dan sebanyak 6 orang (20.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa teknologi informasi akan menghasilkan hasil (*output*) berupa laporan keuangan dengan tepat waktu dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Tabel 4.11
Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah memenuhi
kebutuhan para pengguna.
Pernyataan X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Ragu-Ragu	6	20.0	20.0	26.7
	Setuju	9	30.0	30.0	56.7
	Sangat Setuju	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.11, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%), setuju sebanyak 9 orang (30.0%), ragu-ragu sebanyak 6 orang (20.0%) dan sebanyak 2 orang (6.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan telah memenuhi kebutuhan para pengguna.

Tabel 4.12
Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian
yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.
Pernyataan X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	20.0
	Ragu-Ragu	10	33.3	33.3	53.3
	Setuju	9	30.0	30.0	83.3
	Sangat Setuju	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.12, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (16.7%), setuju sebanyak 9 orang (30.0%), ragu-ragu sebanyak 10 orang (33.3%) tidak setuju sebanyak 5 orang (16.7%) dan sebanyak 1 orang (3.3%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 10 orang (33.3%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.

3. Peran Dan Fungsi Internal Audit (X₃)

Tabel 4.13
Adanya pengawasan kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang
ada.
Pernyataan X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	53.3
	Setuju	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.13, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa adanya pengawasan kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada.

Tabel 4.14
Adanya SOP untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran.
Pernyataan X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	53.3
	Setuju	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.14, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%) ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan setuju bahwa adanya SOP untuk penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran.

Tabel 4.15
Adanya jasa konsultasi oleh inspektorat untuk menyajikan penataan laporan keuangan dengan baik.
Pernyataan X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	60.0
	Setuju	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.15, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 6 orang (20.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa adanya jasa konsultasi oleh inspektorat untuk menyajikan penataan laporan keuangan dengan baik.

Tabel 4.16
Adanya keterlibatan inspektorat dalam perencanaan dan pembuatan keputusan strategis di setiap instansi.
Pernyataan X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	56.7
	Setuju	12	40.0	40.0	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.16, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa adanya keterlibatan inspektorat dalam perencanaan dan pembuatan keputusan strategis di setiap instansi.

Tabel 4.17
Adanya analisis aktivitas yang dianggap menyimpang sehingga dapat merugikan instansi terkait.

Pernyataan X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	14	46.7	46.7	63.3
	Setuju	10	33.3	33.3	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.17, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 10 orang (33.3%), ragu-ragu sebanyak 14 orang (46.7%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa adanya analisis aktivitas yang dianggap menyimpang sehingga dapat merugikan instansi terkait.

4. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4.18
Laporan keuangan yang disajikan akan diterbitkan sesuai dengan periode akuntansi.

Pernyataan Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	9	30.0	30.0	43.3
	Setuju	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.18, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang (56.7%), ragu-ragu sebanyak 9 orang (30.0%), dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden

paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang (56.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa laporan keuangan yang disajikan akan diterbitkan sesuai dengan periode akuntansi.

Tabel 4.19
Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan dengan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.
Pernyataan Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	60.0
	Setuju	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.19, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%), dan sebanyak 6 orang (20.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan disajikan dengan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.

Tabel 4.20
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
Pernyataan Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	56.7
	Setuju	12	40.0	40.0	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.20, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Tabel 4.21
Informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.
Pernyataan Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	13	43.3	43.3	56.7
	Setuju	12	40.0	40.0	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.21, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (43.3%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.

Tabel 4.22
Laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.
Pernyataan Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	53.3
	Setuju	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.22, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.

a. Uji Kualitas Data Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

Tabel 4.23
Uji Validitas (X₁) Penerapan SAP
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X1.1	13.5667	6.806	.780	.740
Pernyataan X1.2	13.4000	6.593	.708	.756
Pernyataan X1.3	13.5333	7.637	.461	.830
Pernyataan X1.4	13.5667	6.806	.780	.740
Pernyataan X1.5	13.4000	7.834	.403	.848

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.23 hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel penerapan SAP dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.24
Uji Validitas (X₂) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X2.1	22.3000	11.941	.475	.648
Pernyataan X2.2	21.7000	14.148	.359	.680
Pernyataan X2.3	22.2667	13.857	.318	.690
Pernyataan X2.4	22.0000	15.034	.347	.686
Pernyataan X2.5	21.7667	11.702	.481	.647
Pernyataan X2.6	21.5333	13.775	.333	.686
Pernyataan X2.7	22.2333	11.702	.577	.618

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.24 hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir pertanyaan pada variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.25 Uji Validitas (X₃) Peran Dan Fungsi Internal Audit
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X3.1	13.0667	5.651	.782	.787
Pernyataan X3.2	13.0667	5.651	.782	.787
Pernyataan X3.3	13.2000	5.890	.631	.826
Pernyataan X3.4	13.1000	6.162	.509	.860
Pernyataan X3.5	13.1667	5.868	.622	.828

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.25 hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel peran dan fungsi internal audit dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.26
Uji Validitas (Y) Kualitas Laporan Keuangan
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	13.1667	6.006	.441	.825
Pernyataan Y.2	13.4000	5.283	.643	.768
Pernyataan Y.3	13.3000	5.183	.635	.770
Pernyataan Y.4	13.2667	4.961	.762	.730
Pernyataan Y.5	13.2667	5.720	.554	.794

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.26 hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel kualitas laporan keuangan dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Tabel 4.27
Uji Reliabilitas (X₁) Penerapan SAP

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.27, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,821 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel penerapan SAP adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.28
Uji Reliabilitas (X₂) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.700	7

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.28 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,700 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.29
Uji Reliabilitas (X₃) Peran Dan Fungsi Internal Audit

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.849	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.29, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,849 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel peran dan fungsi internal audit adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.30
Uji Reliabilitas (Y) Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.815	5

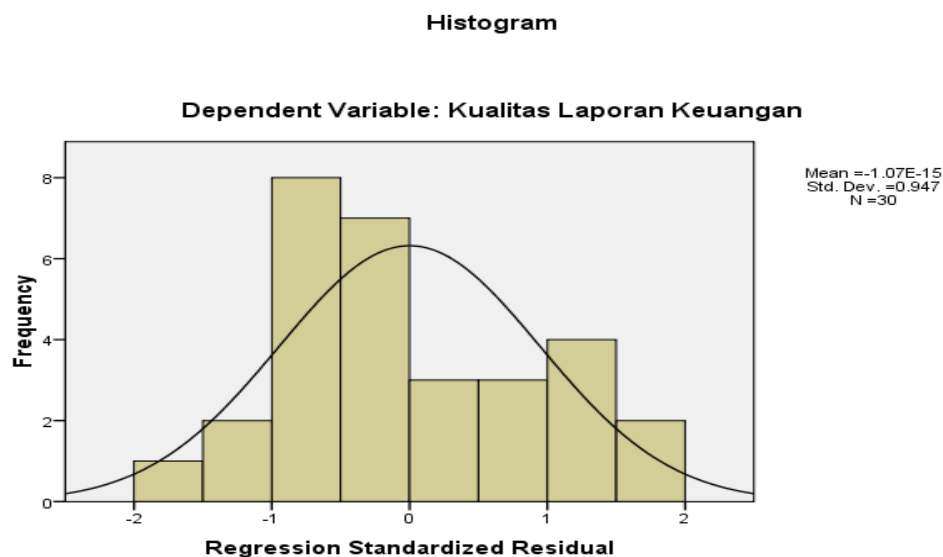
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Dari Tabel 4.30, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,815 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan adalah reliabel atau dikatakan handal.

6. Pengujian Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas data

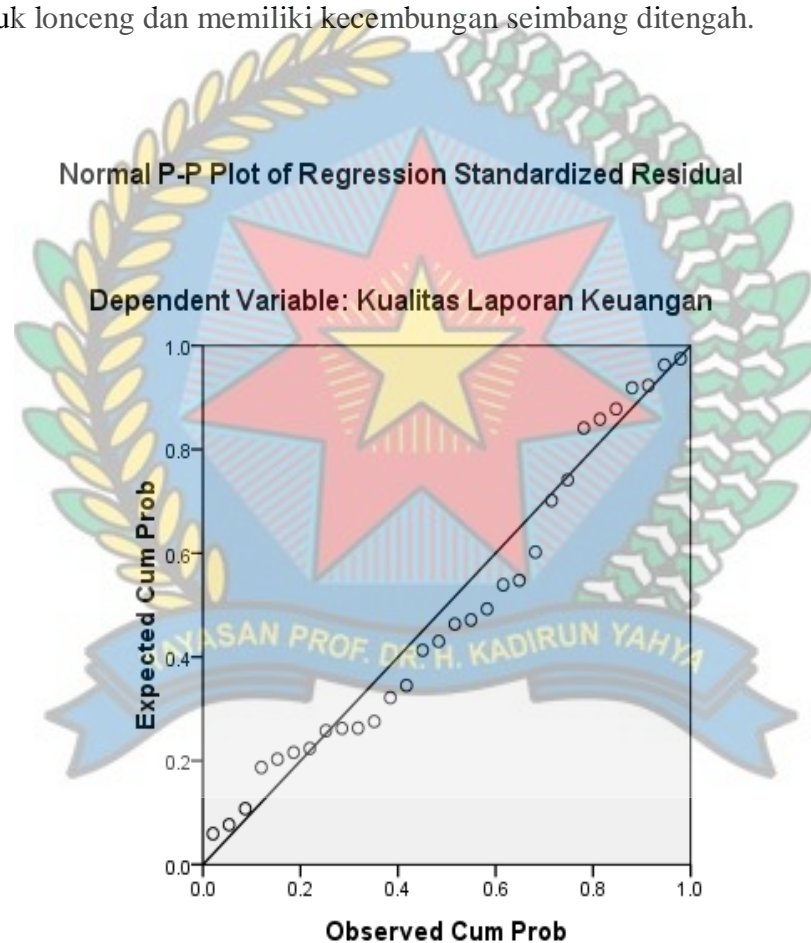
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.3, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel kualitas laporan keuangan berdistribusi secara normal.

B. Uji Multikolinieritas

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) = $1/\text{Tolerance}$, jika VIF = 0 maka $1/10 = 0.1$.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.31
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	Penerapan SAP	.174	.082	2.109	.045	.409	2.444
	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	.142	.051	2.763	.010	.658	1.519
	Peran dan Fungsi Internal Audit	.630	.092	6.814	.000	.395	2.533

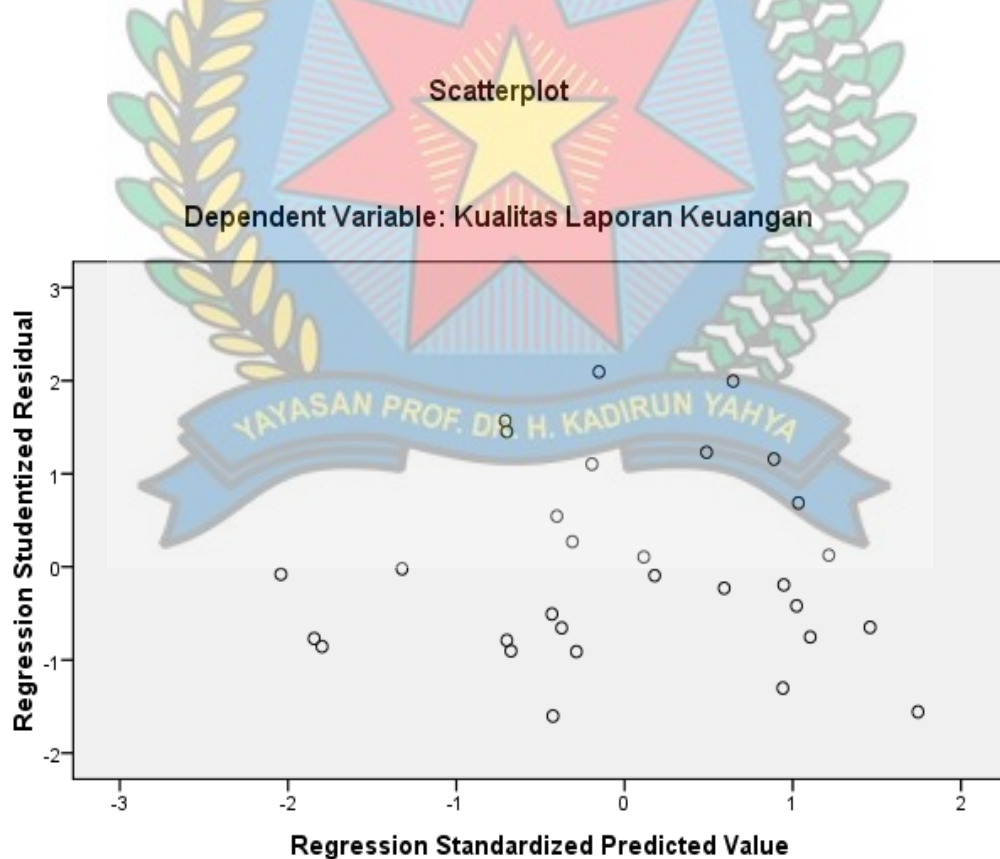
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.31 dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah penerapan SAP $2,444 < 10$, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah $1,519 < 10$ dan peran dan fungsi internal audit $2,533 < 10$, serta nilai *Tolerance* penerapan SAP $0,409 > 0,10$, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah $0,658 > 0,10$ dan peran dan fungsi internal audit $0,395 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Gambar 4.4 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.4, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

7. Pengujian Hipotesis

A. Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (Independen). Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.32
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	Penerapan SAP	.174	.082	2.109	.045	.409	2.444
	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	.142	.051	2.763	.010	.658	1.519
	Peran dan Fungsi Internal Audit	.630	.092	6.814	.000	.395	2.533

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.32 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = -0,296 + 0,174 X_1 + 0,142 X_2 + 0,630 X_3$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar -0,296.
- Jika terjadi peningkatan penerapan SAP 1, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,174.
- Jika terjadi peningkatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebesar 1, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,042.

- d. Jika terjadi peningkatan peran dan fungsi internal audit sebesar 1, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,630.

B. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.33
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212.836	3	70.945	82.482	.000 ^a
	Residual	22.364	26	.860		
	Total	235.200	29			

a. Predictors: (Constant), Peran dan Fungsi Internal Audit, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan SAP

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.33 dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 82,482 sedangkan F_{Tabel} sebesar 2,98 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran Tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini penerapan SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

C. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

Tabel 4.34
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.296	1.171	-.253	.802		
	Penerapan SAP	.174	.082	2.109	.045	.409	2.444
	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	.142	.051	2.763	.010	.658	1.519
	Peran dan Fungsi Internal Audit	.630	.092	6.814	.000	.395	2.533

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.34 dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,109 > t_{Tabel} 2,055$ dan signifikan $0,045 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

- 2) Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,763 > t_{Tabel} 2,055$ dan signifikan $0,010 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Pengaruh peran dan fungsi internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 6,814 > t_{Tabel} 2,055$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan peran dan fungsi internal audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

D. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada Tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah *Square* variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.35
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.951 ^a	.905	.894	.92744

a. Predictors: (Constant), Peran dan Fungsi Audit, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan daerah, Penerapan SAP

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 4.35 dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,894 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 89,4% kualitas laporan keuangan dapat diperoleh dan dijelaskan oleh penerapan SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit. Sedangkan sisanya $100\% - 89,4\% = 10,6\%$ dijelaskan oleh faktor

lain atau variabel diluar model, seperti penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja, pengawasan dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,109 > t_{Tabel} 2,055$ dan signifikan $0,045 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kualitas tata kelolaan keuangan negara akan semakin baik jika penerapan SAP telah dilakukan dengan baik pula. Hal ini sejalan dengan penelitian (Roni, 2018) yang menyebutkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Evicahyani, 2016) juga menyebutkan bahwa pengaruh penerapan SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,763 > t_{Tabel} 2,055$ dan signifikan $0,010 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan PP nomor 65 tahun 2010, SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi

informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Proses pengelolaan data dan transaksi serta penyajian laporan keuangan akan sangat terbantu jika pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini juga akan berdampak pada ketepatan waktu pemerintah daerah dalam melakukan penyajian informasi laporan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Evicahyani., 2016) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kalitas laporan keuangan daerah. Penelitian (Yuliani, 2020) menyatakan bahwa SIAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Pengaruh Peran Dan Fungsi Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 6,814 > t_{Tabel} 2,055$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan peran dan fungsi internal audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. Jadi, sistem pengendalian intern adalah faktor eksternal yang dirancang untuk memudahkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian (Evicahyani, 2016) bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung penengndalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten tabanan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian

(Indriasih, 2018) (Afiah, 2017) bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4. Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Peran Dan Fungsi Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 82,482 sedangkan F_{Tabel} sebesar 2,98 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran Tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini penerapan SAP, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

PP nomor 71 Tahun 2010, penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Proses pengelolaan data dan transaksi serta penyajian laporan keuangan akan sangat terbantu jika pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini juga akan berdampak pada ketepatan waktu pemerintah daerah dalam melakukan penyajian informasi laporan keuangan daerah. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. Jadi, sistem pengendalian intern adalah faktor eksternal yang dirancang untuk memudahkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
2. Penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
3. Penerapan peran dan fungsi internal audit secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
4. Penerapan SAP, penerapan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran dan fungsi internal audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Medan

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kota Medan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi gambaran untuk dipertimbangkannya faktor-faktor yang harus ditingkatkan seperti penyesuaian penerapan SAP yang berlaku agar

sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku, melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk masing-masing SDM yang melakukan pelaksanaan dan pelaporan anggaran dalam setiap program yang dijalankan agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Medan.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan teknik pengamatan tidak hanya menggunakan kuesioner saja namun menambahkan teknik seperti wawancara dan observasi, hal ini akan memberikan jawaban yang lebih baik tentang keadaan di masing-masing kecamatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan diharapkan untuk mencari variabel lain karena pada penelitian ini hanya memperoleh hasil sebesar 89,4% sehingga masih ada faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.15408/Akt.V9i1.3583>
- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2017). The Effect of The Implementation of Government Internal Control System (GICS) On The Quality of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Provincial Government In Sou. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Cadbury, A. (2019). The code of best practice report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee and Co Ltd, 27
- Cohen, J. R., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. (2018). The corporate governance mosaic and financial reporting quality. *Journal of accounting literature*, 87-152.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, Ny. Dj. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.3, 403-428
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harlinda. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *e-Jurnal Universitas Riau*, 11(2). ISSN 1907-364X
- Indriasih, Dewi. (2018). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *IISTE*, Vol 5(20). ISSN 2222-1697
- Mahsun, Moh., Sulistyowati, F., Purwanugraha, H. E. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mahmudi. (2018). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah-panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, Yogyakarta : Unit penerbit dan pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Manullang, O. E. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (*Tesis*). Universitas Sumatera Utara.

Mardiasmo. (2016). *Autonomy and financial management Areas*. Andi: Yogyakarta

Peraturan BPK No 1 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 (2006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 (2008).

Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 (2010).

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (2010).

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 (2005).

Permendagri No 56 tahun 2013 (2013).

Perwali No 18 tahun 2012 (2012).

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Priyatno, Duwi, 2019. *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Gava Media, Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang- Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004).

Roni, M., Husnan, L.H., & Fitria, N. (2018). Determinan kualitas laporan keuangan satuan kerja Di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara Mataram. Vol. 3(2),175-187

Sari, M., M.YN.P I Made Pradana Adiputra, Edy Sujana. (2018). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pmerintah Kabupaten Jembrana). *E-jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2. No. 1.

Sawyer. (2017). *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Situmorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lufti. 2018. Analisis Data, USU Press, Medan.

- Suherman, Ade. (2018). Pengaruh Audit Internal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Vol. 6(2), 87-92
- Sugiyono. (2018). *Statistika untuk Penelitian*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan. Alfabeta, Bandung.
- Surastiani., & Handayani, B.D. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. JDA, Vol, 7(2), 139-149. ISSN 2085-4277
- Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2004).
- Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 10 (2003).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 (2004).
- Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah (2004).
- Yahya, Idhar., Hasibuan, R. P. Sari., Torong, Z. B., Muda, Iskandar. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (SAP) based on acrual in the government of districts/cities in north sumatera province. *Journal of Management information dan Decision Sciences*. Vol. 21. Issue 1. 1532-5808-21-1-109.
- Yuliani, S., Safrida., & Bakar, U. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Vol, 3(2). 206-220.